

Lampiran 1
Formulir Isian 401

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR.....
TENTANG
PEMBERIAN HAK..... ATAS NAMA.....
ATAS TANAH DI.....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

- Membaca : Surat pemohon dari.....tanggal.....berkedudukan di.....
berserta berkas yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang : a. Bahwa pemohon, mengajukan Permohonan Hak.....atas
sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral,yang diuraikan
dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal..... Nomor.....
seluas.....M2(.....), terletak di Desa/
Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/
Kotamadya....., Propinsi.....
b. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah.....yang
telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik
sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan petugas
Konstatering Rapport yang dituangkan dalam laporan
Konstataasi/Tim Peneliti Tanah yang dituangkan dalam Berita
Acara/Panitia Pemeriksaan Tanah Yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah A tanggalNomor.....
c. Bahwa pemohon telah (akan) menggunakan tanah tersebut
untuk..... sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan
tanahnya.
d. Bahwa Panitia A berpendapat permohonan tersebut dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan (opsional : Bila pada huruf b di
atas Konstatering Rapport atau Tim Peneliti Tanah, maka huruf d
di sesuaikan)
e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonn Hak.....dimaksud dipandang telah cukup dan
memenuhi syarat serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah
sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 (opsioanl);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 (opsional);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;
8. Keputusan Presiden Nomor.....Tahun.....;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
1989;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 1998 jo Nomor 6 tahun 1998;

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.....Tahun.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menerima pelepasan Hak.....sebagai dimaksud dalam sertipikat Hak...../berkas tanah Milik Adat (girik, yasan, pajak hasil bumi, letter c dan lain lain yang sama dengan itu, atas nama....., seluas.....M2, dan terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kotamadya.....(yang nomor hak, girik, yasan, pajak hasil bumi, letter c dan lain-lain, nama, luas dan letaknya sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini) dan menegaskannya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara serta tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah (bila diperlukan).
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... untuk menarik sertipikat/girik,yasan,pajak hasil bumi,letter c dll tersebut dalam Ditum PERTAMA dan mencoretnya dari buku tanah,sertipikat serta daftar umum lainnya/dan mencatat dalam girik,yasan,pajak hasil bumi,letter c dll(bila diperlukan).
- KETIGA** : Memberikan kepada.....berkedudukan di..... Hak..... dalam jangka waktu selama..... (.....) tahun, semenjak pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... atas sebidang tanah seluas.....M2(.....) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/Gambar Situasi tanggal..... Nomor..... terletak di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kotamadya..... Propinsi.....dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
1. Segala akibat biaya,untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
 2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya.
 3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan.
 4. Penerima hak diwajibkan membayar lunas uang pemasukan kepada negara,melalui Bendahara Khusus/Penerima Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Disetor pada Kas Negara sebesar Rp.....(.....)
 - b. Disetor pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya.....sebesar Rp.....(.....)
 - c. Disetor pada Kas Pemerintah Daerah Propinsi.....sebesar Rp.....(.....)
 5. Penerima hak terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan terhitung sejak tanggal Keputusan ini serta harus

dibayar lunas pada Bank Persepsi di daerah Kabupaten/
Kotamadya/Propinsi untuk Kotamadya Administratif yang meliputi
letak tanah dan atau Bangunan (opsional)

6. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.....

KEEMPAT : Untuk memperoleh tanda bukti Hak berupa sertipikat,penerima hak
harus terlebih dahulu membayar lunas uang pemasukan kepada Negara
dan mendaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana dipersyaratkan pada
Diktum KETIGA butir 4 dan 6 tersebut di atas selambat-lambatnya 9
(sembilan) bulan sejak tanggal keputusan ini dengan memperlihatkan
asli surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta
menyerahkan fotocopynya pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.....

KELIMA : Hak.....ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....

KEENAM : Keputusan Pemberian Hak.....ini batal dengan sendirinya.apabila
penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum
KETIGA dan Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian
Hak.....ini,penerima hak dianggap memilih domisili pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....

KEDELAPAN: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam
penetapannya,keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

AN.MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.....

(.....)

KEPADA :

.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

2. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi..... di.....
4. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
5. Kepala Biro Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.....di.....
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.....di.....
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, di.....
9. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di.....
10. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota.....di.....

Lampiran 1
Formulir Isian 401 a

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN ATAS NAMA.....
ATAS TANAH DI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

- Membaca : Surat permohonan dari tanggal berkedudukan di, beserta berkas yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang : a. Bahwa pemohon, mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak atas tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal nomor seluas M² (.....) terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Provinsi
- b. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Petugas Konstatering Repport yang dituangkan dalam Laporan Konstataasi/Tim Penelitian Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara/Panitia Pemeriksaan Tanah A yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal Nomor....., pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan yang telah (akan) mempergunakan untuk sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanahnya (opsional).
- c. Bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 (opsional).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989.
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menolak permohonan hak dari
alamat/berkedudukan atas bidang tanah seluas
M²/Ha (.....) terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan
..... Kab/Kotamadya....., Provinsi, Surat
Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam
penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

**AN. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.....

(.....)

KEPADA :

.....
.....

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di

Lampiran 1
Formulir Isian 401 b

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN HAK ATAS NAMA
ATAS TANAH DI KABUPATEN/KOTAMADYA

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

- Membaca : Surat permohonan dari tanggal, berkedudukan di, beserta berkas yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang : a. Bahwa pemohon, mengajukan permohonan Hak atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor Seluas M² (.....) terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Provinsi
- b. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Petugas Konstatering Rapport yang dituangkan dalam Laporan Konstatasi/Tim Penelitian Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara/Panitia Pemeriksaan Tanah A atau B yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A atau B tanggal Nomor (opsional).
- c. Bahwa pemohon telah (akan) mempergunakan tanah tersebut untuk sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanahnya.
- d. Bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk dikabulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sesuai suratnya tanggal Nomor (khusus untuk permohonan HGU huruf d ini disesuaikan yaitu usul Panitia B).
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Hak Dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963; (opsional)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996; (opsional)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
8. Keputusan Presiden Nomor Tahun
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989;

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 jo. Nomor 6 Tahun 1998;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menerima pelepasan Hak sebagai dimaksud dalam sertipikat Hak /bekas tanah milik adat (girik, yasan, pajak hasil bumi, letter c dll yang sama dengan itu) atas nama seluas M² yang terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Provinsi (yang nomor hak, girik yasan, pajak hasil bumi letter c dll, nama, luas, dan letaknya sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini) dan menegaskannya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara serta tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti yang sah (bila diperlukan).
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk menarik sertipikat, girik, yasan, pajak hasil bumi, letter c dan lain-lain tersebut Diktum PERTAMA dan mencoretnya dari buku tanah, sertipikat serta daftar umum lainnya dan mencatat dalam girik, yayasan, pajak hasil bumi, letter c dan lain-lain. (bila diperlukan)
- KETIGA** : Memberikan kepada, berkedudukan di, Hak dalam jangka waktu selama (.....) tahun, semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, atas sebidang tanah seluas M² (.....) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi/Peta Situasi tanggal Nomor terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Provinsi, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
 2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya.
 3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan.
 4. Penerima hak diwajibkan membayar lunas uang pemasukan kepada Negara melalui Bendahara Khusus /penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Disetor pada Kas Negara sebesar Rp
(.....)
 - b. Disetor pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya sebesar Rp (.....)
 - c. Disetor pada Kas Pemerintah Daerah Provinsi
Sebesar Rp (.....)
5. Penerima hak terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan dihitung sejak tanggal keputusan ini serta harus dibayar lunas pada Bank Persepsi di Daerah Kabupaten/Kotamadya/Provinsi untuk Kotamadya Administratif yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. (opsional)
 6. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

KEEMPAT : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat, penerima hak harus terlebih dahulu membayar lunas uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana dipersyaratkan pada Diktum KETIGA butir 4 dan 6 tersebut di atas selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak tanggal keputusan ini dengan memperlihatkan asli surat setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan atau Bangunan serta menyerahkan fotocopynya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

KELIMA : Hak ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

KEENAM : Keputusan Pemberian Hak ini batal dengan sendirinya, apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak ini, penerima hak dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

AN. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi

(.....)

KEPADA :

.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi.....di.....
4. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
5. Kepala Biro Tata Usaha, Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
6. Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi....., di.....
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.....di.....
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....di.....
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, di.....
10. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di.....

Lampiran 1
Formulir Isian 401 c

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN ATAS NAMA
ATAS TANAH DI

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI.....

Membaca : Surat permohonan dari tanggal, berkedudukan di, beserta berkas yang berhubungan dengan itu.

- Menimbang :
- a. Bahwa pemohon, mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak atas tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal..... Nomor.... seluas M² (.....) terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kotamadya....., Propinsi.....
 - b. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Petugas Konstatering Rapport yang dituangkan dalam Laporan Konstataasi/Tim Penelitian Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara/Panitia Pemeriksaan Tanah A atau B yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A atau B tanggal..... Nomor....., pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan Yang telah (akan) mempergunakannya untuk..... sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanahnya. (opsional)
 - c. Bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk ditolak/dikabulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan suratnya tanggal..... Nomor.....
 - d. Bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996; (Opsional)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
 6. Keputusan Presiden Nomor....Tahun
 7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989;
 8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
 9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor... Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Menolak permohonan hak dari alamat/berkedudukan atas bidang tanah seluas M²/Ha

(.....) terletak di Desa/Kelurahan
....., Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya
..... Propinsi....., Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal.....
Nomor.....

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam
penetapannya keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mertinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI :.....
PADA TANGGAL :.....

AN. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi

(.....)

KEPADA :

.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta,
2. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta,
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... di

Lampiran 1
Formulir Isian 401 e

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN ATAS NAMA.....
ATAS TANAH DI

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Membaca : Surat permohonan dari tanggal, berkedudukan di, beserta berkas yang berhubungan dengan ini.

Menimbang : a. Bahwa permohon, mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Atas tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas M² (.....) terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi

b. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Petugas Konstatering Rapport yang dituangkan dalam Laporan Konstataasi/Tim Penelitian Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara/Panitia Pemeriksaan Tanah A atau B yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A atau B tanggal Nomor, permohonan memperoleh tanah tersebut berdasarkanyang telah (akan) mempergunakannya untuk sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanahnya. (opsional).

c. Bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk ditolak/dikabulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dengan surat tanggal Nomor

d. Bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 (opsional);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Menolak permohonan hak dari alamat/berkedudukan atas bidang tanah seluas M²/Ha (.....) terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan

....., Kabupaten/Kotamadya, Propinsi, Surat
Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

(.....)

KEPADA :
.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di

Lampiran 2
Formulir Isian 402

PERMOHONAN HM, HGB, HP
dan HPL

Kepada Yth,
Bapak Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta

up.
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
di

Yang bertanda tangan di bawah ini alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan dengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI DIRI PEMOHON

1. Nama dan Umur :
2. Kewarganegaraan dan/ atau Kartu Penduduk (KTP) ataupun surat-surat bukti identitas lainnya :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Tempat tinggal/kedudukan :
5. Susunan keluarga isteri :
6. Anak yang masih menjadi tanggungan :
 - a.
 - b.
 - c.
7. Akte Pendirian/Peraturan Badan Hukum :
Tgl/Nomor/Peraturan Pendirian Tgl/
Nomor Keputusan Menteri Dalam
Negeri/Kehakiman

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letaknya : Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Provinsi :
 2. Luasnya :M²
Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl Nomor
 3. Batas-batas : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
 4. Status Tanah : Tanah Negara bekas/
Hak, Sertipikat
(Hak Yang melekat di atas
Tanah) : SKPT/Ketitir/Surat Keterangan
Lurah TglNo.....
 5. Jenis dan Keadaan Tanah :
 6. Dasar Penguasaan :
(Siapa yang menguasai Sekarang kalau permohonan ,
apa dasarnya sebutkan tanggal/nomor aktenya secara beruntun)
 7. Rencana Penggunaannya :
-

C. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI SIPEMOHON

(Sebutkan Status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten/Kotamadyanya saja) : 1.
Kabupaten/Kodya.....
2.....
3.....
4.....dst

D. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Foto copy KTP/Surat Bukti Kewarga Negara Indonesia/
Surat Bukti Identitas lainnya :
2. Foto copy akta atau peraturan
Pendirian Badan Hukum dan Pengesahannya :
3. Sertipikat, Girik, Surat Kapling, Surat-Surat
Bukti Pelepasan Hak dan pelunasan tanah dan
rumah yang telah dbeli dari Pemerintah, akta
PPAT, Akta pelapasan hak, putusan
pengh asilan, surat-surat bukti perolehan lainnya :
4. Salinan Surat Ukur/Gambar Situasi : Tanggal.....Nomor.....
5. IMB : Tanggal.....Nomor.....
6. Foto copy Surat Persetujuan Bidang Usaha dari
Instansi : Tanggal..... Nomor.....
7. Foto Copy Surat Rekomendasi dari Departemen
Luar Negeri : Tanggal... Nomor.....
8. Surat pernyataan penguasaan Tanah (untuk
Instansi) : TanggalNomor.....
9. Surat Pernyataan pemohon mengenai jumlah
bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki : Tanggal..... Nomor.....
10. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Instansi : Tanggal..... Nomor
11. Surat Penunjukan atau Penyerahan tanah dari
pemerintah : Tanggal Nomor
12. Surat Rencana Penguasaan Tanah Jangka
Pendek dan Jangka Panjang : Tanggal Nomor
13. Surat Pernyataan atau Bukti bahwa seluruh
modalnya dimiliki oleh pemerintah : Tanggal..... Nomor
14. Surat-Surat Lain :

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Catatan : Coret yang tidak perluTgl.....
Pemohon,
(.....)

Lampiran 2
Formulir Isian 402 a

PERMOHONAN HM, HGB, HP dan HPL

Kepada Yth,
Bapak Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta
up.
Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi
melalui Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya
di

Yang bertanda tangan di bawah ini alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan dengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI DIRI PEMOHON

1. Nama dan Umur :
2. Kewarganegaraan dan/atau Kartu Penduduk (KTP) ataupun surat-surat bukti identitas lainnya :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Tempat tinggal/kedudukan :
5. Susunan keluarga isteri :
6. Anak yang masih menjadi tanggungan :
 - a.
 - b.
 - c.
7. Akte Pendirian/Peraturan Badan Hukum:.....
Tgl/Nomor/Peraturan Pendirian Tgl/
Nomor Keputusan Menteri Dalam
Negeri/Kehakiman

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letaknya : Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Provinsi :
2. Luasnya :M²
Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl Nomor
3. Batas-batas : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
4. Salinan Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.....Nomor.....
5. Ijin Mendirikan Bangunan: Tgl.....Nomor.....
6. Fotocopy surat persetujuan bidang usaha dari instansi : Tgl.....Nomor.....
7. Fotocopy surat rekomendasi dari Deplu : Tgl.....Nomor.....
8. Surat pernyataan Penguasaan tanah (untuk instansi) : Tgl.....Nomor.....
9. Surat pernyataan permohonan mengenai jenis bidang : Tgl.....Nomor.....

- Luas, dan status tanah yang telah dimiliki.
10. Surat pelepasan kawasan hutan dari instansi : Tgl.....Nomor.....
 11. Surat penunjukan/penyerahan tanah dari pemerintah : Tgl.....Nomor.....
 12. Surat rencana penguasaan tanah jangka pendek dan jangka panjang : Tgl.....Nomor.....
 13. Surat pernyataan atau bukti bahwa seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah : Tgl.....Nomor.....
 14. Surat-surat lain

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Catatan : Coret yang tidak perlu

.....Tgl.....

Pemohon,

(.....)

Lampiran 2
Formulir Isian 402b

PERMOHONAN HGU

Kepada Yth,
Bapak Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta
up.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi
di

Yang bertanda tangan di bawah ini alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan Hak Guna Usaha dengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI DIRI PEMOHON :

1. Nama Pemohon/Badan Usaha :
2. Domisili /Tempat Kedudukan :
3. Akte Pendirian Badan Hukum :
4. Pengesahan/Izin Usaha dari :
5. NPWP :

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letaknya

- a. Kelurahan/Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kotamadya :
- d. Provinsi :

2. Luasnya :M²
Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl Nomor

3. Batas-batas : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

4. Status Tanah : Tanah Negara bekas/
Hak, Sertipikat
(Hak Yang melekat di atas
Tanah) : SKPT/Ketitir/Surat Keterangan
Lurah TglNo.....

5. Jenis dan Keadaan Tanah :

6. Dasar Penguasaan :

7. Rencana Penggunaannya :

C. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI SIPEMOHON

(Sebutkan Status tanah,
luas dan letaknya dengan menunjuk
Kabupaten/Kotamadyanya saja)

: 1.
Kabupaten/Kodya.....
2.
3.dst

D. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Akte Pendirian Badan Usaha/Perda/Kep
yang berwenang : No Tgl
2. SK. Pengesahan Badan Usaha : No Tgl
3. Rencana Pengusahaan tanah jangka pendek dan
jangka panjang :
4. Surat Ukur/Gambar Situasi :
5. Izin Lokasi/Surat Izin Penggunaan Tanah/Surat Izin
Pencadangan Tanah :
6. Surat Pelepasan Kawasan Hutan :
7. Akte Pelepasan Bekas Tanah Milik Adat :
8. Surat bukti perolehan tanah lainnya berupa :
9. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri
/PMA/Surat Persetujuan dari Presiden/Surat
Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis :

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

.....Tgl.....

Pemohon,

(.....)

Catatan : Coret yang tidak perlu

Lampiran 2
Formulir Isian 402c

PERMOHONAN HM, HGB, HP, dan HPL

Kepada Yth,
Bapak Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta
up.
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
di

Yang bertanda tangan di bawah ini alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan dengan keterangan sebagai berikut :

A MENGENAI DIRI PEMOHON :

1. Nama dan Umur :
2. Kewarganegaraan dan/atau Kartu Penduduk (KTP) ataupun surat-surat bukti identitas lainnya :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Tempat Tinggal/kedudukan :
5. Susunan Keluarga Istri :
6. Anak yang masih menjadi tanggungan : a.
b.
c.
7. Akte Pendirian/Peraturan Badan Hukum tgl/No Akte/Peraturan Pendirian Tgl/ Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Kehakiman :

B MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letaknya : Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Provinsi :
2. Luasnya :M²
Surat Ukur/Gambar Situasi
Tgl Nomor
3. Batas-batas : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
4. Status Tanah : Tanah Negara bekas/
Hak, Sertipikat
(Hak Yang melekat di atas
Tanah) : SKPT/Ketitir/Surat Keterangan
Lurah TglNo.....
5. Jenis dan Keadaan Tanah :

6. Dasar Penguasaan :
- (Siapa yang menguasai Sekarang kalau pemohon,
apa dasarnya sebutkan tanggal/nomor aktenya secara beruntun)
7. Rencana Penggunaannya :

C TANAH LAIN YANG DIPUNYAI SIPEMOHON

- (Sebutkan Status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten/Kotamadyanya saja) : 1.
Kabupaten/Kodya.....
2.
3.
4.dst

D SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Foto copy KTP/Surat Bukti Kewarga Negara Indonesia/
Surat Bukti Identitas lainnya :
2. Foto copy akta atau peraturan
Pendirian Badan Hukum dan Pengesahannya :
3. Sertipikat, Girik, Surat Kapling, Surat-Surat
Bukti Pelepasan Hak dan pelunasan tanah dan
rumah yang telah dbeli dari Pemerintah, akta PPAT,
Akta pelapasan hak, putusan pengadilan, surat-surat
bukti perolehan lainnya. :
4. Salinan Surat Ukur/Gambar Situasi : Tanggal.....Nomor.....
5. IMB : Tanggal.....Nomor.....
6. Foto copy Surat Persetujuan Bidang Usaha dari Instansi : Tanggal..... Nomor.....
7. Foto Copy Surat Rekomendasi dari Departemen Luar
Negeri : Tanggal... Nomor.....
8. Surat pernyataan penguasaan Tanah (untuk Instansi) : TanggalNomor.....
9. Surat Pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang,
luas dan status tanah yang telah dimiliki : Tanggal..... Nomor.....
10. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Instansi : Tanggal..... Nomor
11. Surat Penunjukan atau Penyerahan tanah dari
pemerintah : Tanggal Nomor
12. Surat Rencana Penguasaan Tanah Jangka Pendek dan
Jangka Panjang : Tanggal Nomor
13. Surat Pernyataan atau Bukti bahwa seluruh modalnya
dimiliki oleh pemerintah : Tanggal..... Nomor
14. Surat-Surat Lain :

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

.....Tgl.....

Pemohon,

(.....)

Catatan : Coret yang tidak perlu

Lampiran 3
Formulir Isian 403

SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI PEMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Berdasarkan Surat Kuasa tanggalNomordalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemohon :

Nama :
 (perorangan atau Badan Hukum)
 Pekerjaan :
 (bila Perorangan)
 Alamat/berkedudukan di :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saya isteri/Suami dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan saya, telah mempunyai tanah-tanah (termasuk tanah yang dimohon sebanyak :(.....) bidang dan luas keseluruhannya adalahM2.....(.....)
- Bahwa P.T (Badan Hukum) telah mempunyai tanah-tanah (termasuk) tanah yang dimohon sebanyak :(.....) bidang dan luas keseluruhannya adalahM2.....(.....)

Yang perinciannya terdiri dari :

Nomor Urut	Status Hak (Jelaskan Nomor Hak / belum sertipikat)	Luas (m2)	Letak Tanah (Kabupaten/Kodya dan Prop)
1.			
2.	Dst		
Jumlah			

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sanggup dituntut dihadapan Pengadilan bila terny ata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar

.....tanggal.....

Pemohon

Materai

(_____)

Nama Jelas

Lampiran 4
Formulir isian 404

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya

Model Buku:
REGISTER PERMOHONAN HAK.....
(Dibuat untuk setiap jenis Hak)

No	No. & tanggal agenda		a. Nama Pemohon b. Alamat c. Pekerjaan	a. letak tanah b. Desa/Kel c. Kec. d. Kab.	KK, BA, TPT, RPT. a. Tgl b.No.	Sk Kakan a. tgl b. No	Usul Kakan a. tgl b. No	Sk Kakanwil a. tgl b. No	Usul Kakanwil a. tgl b. No	Sk Kep BPN a. tgl b. No	Uang pemasukan			Sertipikat a.tgl b.nomor.	Ket
	Umum(Sub bag TU)	HHT									Neg	Pemda TK I	Pemda TK II		

Lampiran 5
Formulir Isian 405

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH

NO. :

Telah terima berkas permohonan Hak....atas nama :

....., yang terletak di jalan, Desa/

Kelurahan....., Kecamatan, yang terdiri dari :

1. Formulir permohonan Hak tanggal
- (yang telah diisi dan ditanda tangani pemohon)
2. Foto copy Identitas (Perorangan)
3. Foto copy akta badan hukum dan pengesahannya atau Peraturan Pendirian Badan Hukum
4. Surat-surat bukti perolehan tanah :
 - a. Sertipikat/Girik/Surat Kapling
 - b. Surat Bukti Pelepasan Hal tanggalnomor
 - c. Akta PPAT (Akta Jual Beli/Akta Waris/Akta Hibah/Akta Wasiat/)tanggal
 -nomor
 - d. Surat pelunasan tanah dan bangunan atau tanah
 - e. Surat pernyataan penguasaan tanah
 - f. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Instansi terkait
 - g. Dst
5. Surat-surat lainnya :
 - a. Surat pernyataan pemohon tanggalmengenai jumlah bidang dan luas tanah yang telah dimiliki.
 - b. Surat Ukur/Gambar Situasi (bila ada)
 - c. Foto Copy Surat Penunjukan sebagai BadanHukum yang dapat memperoleh Hak Milik
 - d. Surat Penunjukan Penggunaan Tanahdaritanggal.....
 - e. Foto Copy kartu ijin menetap
 - f. Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
 - g. Foto Copy Surat Persetujuan bidang usaha dari Instansi.....tanggal
 - h. Ijin lokasi/SIPPT
 - i.Dst

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Petugas yang menerima,

(.....)
NIP.

Keterangan

Coret yang tidak perlu

Lampiran 6
Formulir Isian 406

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

Nomor : Kepada yth.
Lampiran : Sdr
Perihal : Pemberitahuan
 : Penetapan biaya di
 : Permohonan hak.....

1. Sehubungan dengan permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan *) yang Saudara ajukan atas tanah yang terletak di :

Jalan :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini diberitahukan bahwa untuk perolehan Hakdimaksud kepada Saudara diwajibkan membayar :

- a. Biaya Pengukuran Rp*)
b. Biaya Pemeriksaan Panitia A Rp*)
c. Uang Pemasukan kepada Negara akan ditetapkan kemudian pada surat Keputusan Pemberian Haknya.

2. Uang tersebut butir 1 harus disetor melalui Bendaharawan Khusus pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya *).....selambat-lambatnya tanggal.....
3. Apabila sampai terlambat batas waktu pembayaran tersebut diatas, maka akan diadakan perhitungan kembali sesuai ketentuan yang berlaku
4. Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Kepal Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya *)

(.....)
NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Bpk. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah BPN
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Catatan

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7
Formulir Isian 407

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

Risalah Pemeriksaan Tanah
(Konstatering Rapport)

No.....

Pada hari ini, hari.....tanggal....., bulan....., tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini,petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadyaberdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomortelah meneliti data yuridis dan data fisik serta datang ke lokasi tanah yang dimohon mengadakan pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya yang keberatan terhadap dikabulkannya permohonan dari :

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Kewarganegaraan :
- e. Tempat tinggal :
- f. Bertindak untuk/
atas nama Badan Hukum :
- g. Berkedudukan di :
- h. Akte Pendirian :
Tanggal....Nomor.....

Untuk mendapatkan perpanjangan/penigkatan/pembaharuan/permohonan hakatas tanah yang terletak di :

Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Propinsi :
Tanggal dan No.Su/GS, luas : TanggalNomor.....seluas.....M2
(.....)

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Status Tanah :
(Uraikan statusnya : Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau bekas Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Tanah Negara.
2. Beban-Beban yang Ada di Atas Tanah :
(Bila ada uraian : Hak Tanggungan, sita Jaminan, Keputusan Pengadilan, dll)
3. Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah :
(Uraikan riwayat penguasaannya, bila pihak lain jelaskan hubungan hukumnya dengan peohon, dan jelaskan juga penggunaan tanahnya : sawah, ladang, kebun , kolam ikan. Perumahan, industri, perkebunan, dikelola pengembang, lapangan umum, sebutkan IMB dan Surat Ijin Lokasi/Penggunaan bila ada)
4. Bukti-Bukti Pemilikan dan Perolehan Tanah :

(Uraikan : Sertipikat, Warisan, Hibah, Pemberian, Pelelangan, Perwakafan, dll)

5. Lain-lain :

(Bila ada agar diuraikan)

6. Kesimpulan :

a. Bahwa permohonan Haktersebut DAPAT DIKABULKAN/TIDAK DAPAT DIKABULKAN dengan alasanTELAH MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT serta TIDAK ADA KEBERATAN/ADA KEBERATAN yang diterima dan kecuali pemohon TIDAK ADA/MASIH ADA yang berhak atas tanah yang dimohon itu.

b. Bahwa NJOP Tanah pada tahunadalah Rp.....(.....) setiap meter persegi.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap.....(.....) untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Petugas Pemerikasa ;

Nama :.....
NIP.....

Mengetahui
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya

(.....)

Catatan :

1. Coret yang tidak perlu
2. Bila Kepala Kantor mengadakan pemeriksaan agar disesuaikan penanda tangannya

Lampiran 8
Formulir Isian 408

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTAMADYA

.....

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TIM PENELITI
TANAH

No.....

(KHUSUS SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN III ANGKA
2 HURUF C SURAT KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 500-1255 TANGGAL 4 MEI 1992)

Pada hari ini, hari.....tanggal....., bulan....., tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku Ketua;
2. : Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku Anggota;
3. : Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku anggota;
4. : Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku anggota;
5. : Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah atau Staff Sub Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku Sekretaris;

Bersama-sama merupakan Tim Peneliti Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Sebagai dimaksud dalam surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500-1522 jo Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan..... tanggal Nomor tahun telah meneliti data yuridis dan data fisik serta datang ke lokasi tanah yang dimohon mengadakan pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya yang keberatan terhadap dikabulkannya petmohonan dari :

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Bertindak untuk dan atas nama :
- d. Berkedudukan di :

Untuk mendapatkan Hak Pakai/Hak Pengelolaan atas tanah yang terletak di :

- a. Jalan :
- b. Desa/Kelurahan :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten/Kotamadya :

- e. Propinsi :
- f. Tanggal dan Nomor SU/GS, Luas : Tanggal..... Nomor.....
Seluas.....M2(.....)

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Status tanah :
(Uraikan statusnya : Hak Milik, Hak Pakai atau Bekas Hak Milik, Hak Pakai atau Tanah Negara).
2. Beban-Beban Yang Ada di Atas Tanah :
(Bila ada uraikan : Hak Tanggungan, Sita Jaminan, Keputusan Pengadilan, dll).
3. Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah :
(Uraikan Riwayat Penguasaan serta penggunaannya saat pemeriksaan dan rencana penggunaannya).
4. Bukti-Bukti Perolehan Tanah :
(Uraikan : Penguasaan sejak kapan, penyerahan atau hibah, pembebasan/pengadaan dengan ganti rugi, dll)
5. Lain-Lain :
(Uraikan bila ada)
6. Kesimpulan :
 - a. Pemohon memenuhi syarat sebagai subyek Hak Pakai (selama dipergunakan)/ Hak Pengelolaan.
 - b. Bahwa permohonan Hak Pakai/Pengelolaan tersebut **DAPAT DIKABULKAN/ TIDAK DAPAT DIKABULKAN** dengan alasan **TELAH MEMENUHI SYARAT /TIDAK MEMENUHI SYARAT** serta **TIDAK ADA KEBERATAN/ADA KEBERATAN** yang diterima dan kecuali pemohon **TIDAK ADA/MASIH ADA** yang berhak atas tanah yang dimohon itu.

TIM PENELITI TANAH :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Lampiran 9
Formulir Isian 409

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTAMADYA

RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A

Nomor :

Pada hari ini, tanggal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Seksi/Staf Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku Ketua merangkap anggota;
2. : Kepala Seksi/Staf Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. : Kepala Seksi/Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku anggota;
4. : Kepala Seksi/Staf Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku anggota;
5. : Kepala Desa/Lurah/Aparat Desa/Kelurahan yang ditunjuk selaku anggota;
6. : Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah atau Staf Sub Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... Selaku Sekretaris merangkap Anggota;

Yang bersama-sama merupakan Panitia dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 yang disertai orang-orang yang tertua dari Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kotamadya/Wilayah..... telah datang di Desa tersebut mengadakan pemeriksaan apakah ada keberatan atau tidak terhadap diluluskannya permohonan dari :

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Tempat Tinggal :
- e. Bertindak untuk dan atas nama :
- f. Berkedudukan di :
- g. Akta pendirian Tgl :

PANITIA PEMERIKSAAN TANAH TERSEBUT :

- 1.
- 2.
- 3.

- 4.
5. dst.

Untuk memperoleh sebidang tanah dengan hak yang letaknya di Desa/ Kelurahan Kecamatan Kab/Kotamadya/Wilayah Itu, luasnyaM2/Ha lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi/peta situasi/surat ukur tanggal Nomor

Setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti di tempat, kami berpendapat bahwa pemberian hak atas tanah tersebut diatas dengan Hak yang dimintakan bertentangan/tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau azas-azas kebijaksanaan Pemerintah karena Bahwa hal itu akan/tidak akan merugikan hak-hak orang lain, karena ternyata dengan jelas kepada kami.

A. RIWAYAT DARI TANAH ITU.

- 1.
- 2.
3. dst.

B. KEADAAN TANAH ITU.

- 1.
- 2.
3. dst.

C. KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN KEPENTINGAN UMUM

- 1.
- 2.
3. dst.

D. PENINJAUAN DARI ASPEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH (LANDREFORM).

1. Bahwa diatas tanah yang dimohon ada/tidak ada penggarapan rakyat, seluas M2/Ha.
2. Bahwa penggarapan tersebut berdasarkan
3. Bahwa penggarap/para penggarap berada/tidak berada di lokasi tersebut.
4. Bahwa penggarapan tersebut dilindungi/tidak dilindungi peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa para penggarap tersebut sudah/belum dibebaskan dengan diberi/tidak diberi ganti rugi/recognisi dalam bentuk
6. Bahwa para penggarap bersedia/tidak bersedia melepaskan penggarapnya.

E. PENINJAUAN DARI ASPEK TATA GUNA TANAH :

- 1.
- 2.
3. dst.

F. KESIMPULAN

- 1.
- 2.
3. dst.

PANITIA PEMERIKSAAN TANAH TERSEBUT :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Lampiran 10
Formulir Isian 410

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTAMADYA

Nomor :.....
Perihal :.....
.....
.....

Kepada Yth.
Bpk. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
di

DAFTAR PENGANTAR

Nomor	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan dan Pertimbangan
1	Asli Permohonan Hak..... Atas Nama		Terhadap Permohonan Tersebut pertimbangan kami : 1. Setuju dikabulkan Diusulkan untuk ditolak 2. Dikenakan uang pemasukan kepada Negara dengan Harga Dasar/NJOP Sebesar Rp..... 3. Syarat-syarat Khusus
2	Asli risalah pemeriksaan tanah tanggal.....		
3	Foto Copy KTP, Kartu Keluarga/ Akta Pendirian Badan Hukum dan Keputusan Pengesahan Badan Hukum.		
4	Foto Copy Sertipikat		
5	Salinan Surat Ukur		
6	Salinan Surat.....		
7	Dst.....		
	Jumlah		

Tembusan :

1. Bapak Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
2. Sdr.....

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
.....

.....
NIP.....

Catatan Penerimaan :

....., tgl. 20.....
An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi.....

.....

Lampiran 12
Formulir Isian 410a

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI.....

Nomor :.....
Perihal :.....
.....
.....

Kepada Yth.
Bpk. Menteri Negara Agraria/
Badan Pertanahan
Nasional
di –
JAKARTA

DAFTAR PENGANTAR

Nomor	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan dan Pertimbangan
1	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....		Terhadap Permohonan Tersebut pertimbangan kami : 1. Setuju dikabulkan Diusulkan untuk ditolak 2. Dikenakan uang pemasukan kepada Negara dengan Harga Dasar/NJOP Sebesar Rp..... 3. Syarat-syarat Khusus
2	Asli Permohonan Hak..... Atas Nama.....		
3	Asli risalah pemeriksaan tanah tanggal.....		
4	Foto Copy KTP, Kartu Keluarga/ Akta Pendirian Badan Hukum dan Keputusan Pengesahan Badan Hukum.		
5	Foto Copy Sertipikat		
6	Salinan Surat Ukur		
7	Salinan Surat.....		
8	Dst.....		
	Jumlah		

Tembusan :

1. Sdr Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya
2. Sdr.....

Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
.....

.....
NIP.....

Catatan Penerimaan :
....., tgl. 20.....
An. Menteri Negara Agrari
Kepala Badan Pertanahan Nasional

.....

Lampiran 15
Formulir Isian 409A

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI.....

RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B

Nomor :

Pada hari ini, tanggal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi....., Selaku Ketua merangkap anggota;
2. : Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi....., Selaku Anggota;
3. : Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi....., Selaku Anggota;
4. : Bupati Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk..... Selaku anggota;
5. : Kepala Dinas Perkebunan/ Pertanian/ Peternakan/ Perikanan Daerah Tingkat I selaku anggota;
6. : Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi....., selaku anggota (Sepanjang tanah yang dimohon termasuk kawasan hutan atau yang berbatasan dengan kawasan hutan).
7. : Pejabat dari selaku anggota.
8. : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya selaku anggota.
9. : Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atau Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.....selaku sekretaris merangkap anggota.

Yang bersama-sama merupakan Panitia dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 telah mengadakan pemeriksaan apakah ada keberatan atau tidak terhadap diluluskannya permohonan dari :

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Tempat Tinggal :
- e. Bertindak untuk dan atas nama :
- f. Tempat Kedudukan :

- g. Akta Pendirian :
 Akta Perubahan :
 Terakhir :

Untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Desa
 Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya....., seluasHa lebih lanjut
 diuraikan dalam gambar situasi/peta situasi/surat ukur tanggal..... Nomor.....

A. RIWAYAT DARI TANAH ITU

- 1.
- 2.
- 3. dst

B. KEADAAN TANAH ITU

- 1.
- 2.
- 3. dst

C. KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN KEPENTINGAN UMUM

- 1.
- 2.
- 3. dst

D. PENINJAUAN DARI ASPEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH (LANDREFORM)

- 1. Bahwa di atas tanah yang dimohon ada/ tidak ada penggarapan rakyat, seluas...M2/Ha.
- 2. Bahwa penggarapan tersebut berdasarkan.....
- 3. Bahwa penggarap/para penggarap berada/tidak berada di lokasi tersebut.
- 4. Bahwa penggarapan tersebut dilindungi/tidak dilindungi peraturan perundang-undangan.
- 5. Bahwa para penggarap tersebut sudah/belum dibebaskan dengan diberi/tidak diberi ganti rugi/recognisi dalam bentuk.....
- 6. Bahwa para penggarap bersedia/tidak bersedia melepaskan penggarapnya.

E. PENINJAUAN DARI ASPEK TATA GUNA TANAH :

- 1.
- 2.
- 3. dst

F. KESIMPULAN

- 1.
- 2.
- 3. dst

PANITIA PEMERIKSAAN TANAH TERSEBUT :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. dst.

Lampiran 16
Formulir Isian 407a

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI.....

Risalah Pemeriksaan Tanah
(Konstatering Rapport)

No.....

Pada hari ini, hari.....tanggal....., bulan....., tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini,petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsiberdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomortelah meneliti data yuridis dan data fisik serta datang ke lokasi tanah yang dimohon mengadakan pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya yang keberatan terhadap dikabulkannya permohonan dari :

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Kewarganegaraan :
- e. Tempat tinggal :
- f. Bertindak untuk/
atas nama Badan Hukum :
- g. Berkedudukan di :
- h. Akte Pendirian :
Tanggal....Nomor.....

Untuk mendapatkan perpanjangan/peningkatan/pembaharuan/permohonan Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di :

- Jalan :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kotamadya :
- Propinsi :
- Tanggal dan No.Su/GS, luas : TanggalNomor.....seluas.....M2
(.....)

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Status Tanah :
(Uraikan statusnya : Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau bekas Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Tanah Negara).
2. Beban-Beban yang Ada di Atas Tanah :
(Bila ada uraian : Hak Tanggungan, sita Jaminan, Keputusan Pengadilan, dll)
3. Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah :
(Uraikan riwayat penguasaannya, bila pihak lain jelaskan hubungan hukumnya dengan peohon, dan jelaskan juga penggunaan tanahnya : sawah, ladang, kebun, kolam ikan. Perumahan, industri, perkebunan, dikelola pengembang, lapangan umum, sebutkan Surat Ijin Lokasi/Penggunaan bila ada)
4. Bukti-Bukti Pemilikan dan Perolehan Tanah :
(Uraikan : Sertipikat, Warisan, Hibah, Pemberian, Pelelangan, Perwakafan, dll)

5. Lain-lain :
(Bila ada agar diuraikan)

6. Kesimpulan :

a. Bahwa permohonan Haktersebut DAPAT DIKABULKAN/TIDAK DAPAT DIKABULKAN dengan alasan TELAH MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT serta TIDAK ADA KEBERATAN/ADA KEBERATAN yang diterima dan kecuali pemohon TIDAK ADA/MASIH ADA yang berhak atas tanah yang dimohon itu.

b. Bahwa harga dasar tanah untuk tiap hektarnya adalah sebesar Rp..... (.....) sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 jo Nomor 6 Tahun 1998.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap.....(.....) untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Petugas Pemeriksa;

Nama :.....
NIP.....

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi.....

(.....)

Catatan :

1. Coret yang tidak perlu
2. Bila Kepala Kantor mengadakan pemeriksaan agar disesuaikan penandatangannya.

Lampiran 17
Formulir Isian 402d

PERMOHONAN HM(Secara Umum)
Atas Tanah Rumah Tinggal

Kepada Yth,
Bpk. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
di

Yang bertanda tangan di bawah ini alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan Hak Milik (Secara Umum) atas tanah untuk rumah tinggal dengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI DIRI PEMOHON

1. Nama dan Umur :
2. Kewarganegaraan dan/ atau Kartu Penduduk (KTP) ataupun surat-surat bukti identitas lainnya :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Tempat tinggal/kedudukan :
5. Susunan keluarga isteri :
6. Anak yang masih menjadi tanggungan :
 - a.
 - b.
 - c.

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Statusnya : HGB No/.....
Bekas HGB No...../.....
Hak Pakai No...../.....,
Bekas Hak Pakai No...../.....
 2. Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl..... Nomor.....
 3. Luasnya :M²
 4. Letaknya : Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Provinsi :
 5. Batas-batas : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
 6. Penggunaannya : Rumah Tinggal
 7. Penguasaannya :
- (Sepenuhnya dikuasai permohonan, atau ditempati oleh pihak lain atas persetujuan pemohon)

C. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI SIPEMOHON

- (Sebutkan Status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten/Kotamadyanya saja)
- : 1.
Kabupaten/
Kodya.....
 2.
 3.

D. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Foto copy Bukti Identitas/ Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia :
 2. Sertipikat Tanah yang dimohon :
 3. Bukti Rumah Tinggal (IMB, Keterangan Kepala Desa/Lurah, dll) :
 4. Foto copy SPPT-Pajak Bumi dan Bangunan :
 5. Surat Pernyataan mengenai jumlah bidang tanah Luas dan status haknya yang dipunyai pemohon :
-

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

.....Tgl.....
Pemohon,
(.....)

Catatan : Coret yang tidak perlu

Lampiran 19
Formulir Isian 405a

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA MADYA

.....

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN
HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL

No.
(Kep/MNA/Ka. BPN No.6 Tahun 1998)

Telah terima berkas permohonan Hak Milik atas nama yang terletak di jalan....., Desa/Kelurahan *) Kecamatan, yang terdiri dari :

1. Formulir permohonan Hak Tanggal
(yang telah diisi dan ditandatangani pemohon)
2. Foto copy Identitas
3. Sertipikat HGB/HP *) Nomor/.....
4. Foto copy IMB/Surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan bahwa bangunan tersebut adalah untuk rumah tinggal (karena IMB tidak/belum dikeluarkan oleh yang berwenang)
5. Foto copy SPPT-PBB Tahun Khusus tanah >200 M2
6. Surat Pernyataan dari pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki tanggal.....

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya *)
Petugas Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran 20
Formulir Isian 406a

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTAMADYA

.....

Kepada Yth,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penetapan
Uang Pemasukan

1. Sehubungan dengan permohonan pendaftaran Hak Milik yang Saudara ajukan atas tanah yang terletak di :

Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Yang berasal dari : Hak Guna Bangunan/Hak Pakai *) No./.....
Tercatat atas nama

2. dengan ini diberitahukan bahwa untuk perolehan Hak Milik dimaksud kepada Saudara diwajibkan untuk membayar uang pemasukan kepada Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 jo Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sebesar Rp..... Terbilang.....**) Uang pemasukan tersebut harus disetor melalui bendaharawan Khusus pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya *) selamat-lambatnya tanggal
3. Apabila sampai terlambat batas waktu pembayaran tersebut di atas maka akan diadakan perhitungan kembali sesuai ketentuan yang berlaku **)
4. Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya *).....

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.....

Catatan :

- *) : Coret yang tidak perlu.
**) : Apabila uang pemasukan 0% dari NJOP, ditulis Rp.) (0 Rupiah) dan pemberitahuan pada angka 2 dan 3 dicoret.

Lampiran 21
Formulir Isian 402 e

PERMOHONAN HM (Secara Umum) Atas Untuk Rumah Tinggal yang telah dibeli Pegawai Negeri dari Pemerintah

Kepada Yth,
Bpk. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....
di

Yang bertanda tangan di bawah ini alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan Hak Milik (Secara Umum) atas tanah untuk rumah tinggal yang telah saya beli dari Pemerintah dengan keterangan sebagai berikut :

A MENGENAI DIRI PEMOHON :

1. Nama dan Umur :
2. Bukti Identitas dan SK – PNS, SK Pensiun, Keterangan Waris, dll :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Tempat Tinggal/kedudukan :
5. Susunan Keluarga Istri :
6. Anak yang masih menjadi tanggungan : a.....
b.....
c.....

B MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

8. Statusnya : Hak Pakai No/.....
Bekas/.....
Tanah Negara dll
9. Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl..... Nomor.....
10. Luasnya :M²
11. Letaknya : Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Provinsi :
12. Batas-batas : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
13. Penggunaannya : Rumah Tinggal
14. Penguasaannya :

(Sepenuhnya dikuasai permohonan, atau ditempati oleh pihak lain atas persetujuan pemohon)

C TANAH LAIN YANG DIPUNYAI SIPEMOHON

- (Sebutkan Status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten/Kotamadyanya saja)
- : 1.
Kabupaten/
Kodya.....
 2.
 3.
 4.dst

D SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

6. Foto copy Buki Identitas/SK PNS, SK Pensiun
Keterangan, Keterangan Waris dll :
7. SertipikatTanah (bila ada) :
8. Surat Bukti Pelunasan Rumah dan Tanah atau
Tanah dari instansi yang berwenang :
9. Surat Bukti dari Instansi yang berwenang bahwa
Rumah tersebut sudah menjadi milik pemohon :
10. Surat Pelepasan hak atas tanah dari Instansi yang
Berwenang kepada pemohon :
11. Surat Pernyataan mengenai jumlah bidang tanah
Luas dan status haknya yang dipunyai pemohon :

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

.....Tgl.....

Pemohon,

(.....)

Catatan : Coret yang tidak perlu

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTAMADYA

.....

TANDA TERIMA DERAH TERIMA BERKAS PERMOHONAN HAK MILIK
UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBELI OLEH PEGAWAI NEGERI
DARI PEMERINTAH

No.....
(Kep.MNA/Ka. BPN No. 2 Tahun 1998)

Telah terima berkas permohonan Hak Milik atas nama:.....yang terletak di jalan.....Desa/
Kelurahan*....., Kecamatan.....yang terdiri dari:

1. Formulir permohonan Hak.....tanggal.....
(yang telah diisi dan ditandatangani pemohon..)
2. Fotocopy Identitas
3. Surat-surat bukti perolehan tanah:
 - a. Sertipikat HGB/HP*) Nomor...../.....
 - b. Surat tanda bukti pelunasan harga rumah dan tanah/Tanah*) dari Instansi.....tanggal.....Nomor.....
 - c. Surat Keputusan dari Instansi.....Tanggal.....Nomor.....yang menyatakan rumah yang dimohon sudah menjadi milik pemohon.
 - d. Surat pelepasan hak atas tanah dari Instansi.....tanggal.....nomor.....
4. Surat – Surat lain:
 - a. Surat Pernyataan dari pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki tanggal.....
 - b.
 - c.dst.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kotamadya
Petugas Yang Menerima,

(.....)
NIP.....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 24
Formulir Isian 401 f

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....
NOMOR:.....
TENTANG
KONFIRMASI PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH
YANG SUDAH DIBELI OLEH PEGAWAI NEGERI DARI
PEMERINTAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan tanah terletak di:
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
SeluasM2(.....meter persegi),
Telah dibeli dari Pemerintah oleh:
Nama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.....Tahun.....tentang.....
.....tanah tersebut diberikan dengan Hak Milik kepada yang bersangkutan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah tersebut perlu mengeluarkan Konfirmasi mengenai pemberian Hak Milik sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
3. Keputusan Presiden Nomor.....Tahun.....
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.....Tahun.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Mengkonfirmasi pemberian Hak Milik atas Tanah terletak di:
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
SeluasM2) sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur
Tanggal.....Nomor.....Atas nama:
Nama

Tanggal Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Tempat Tinggal :.....

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada waktu ditetapkan

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
Kabupaten/Kotamadya.....

(.....)
NIP.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (Sebagai Laporan)
2. Para Deputi BPN
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.....
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 25
Formulir Isian 402 f

PERUBAHAN HAK

Kepada Yth,
Bpk. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kotamadya
.....
di.....

Yang bertanda tangan dibawah ini.....alamat.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....*), dengan ini mengajukan permohonan perubahan Hak.....menjadi.....dengan keterangan sebagai berikut:

A. MENGENAI DIRI PEMOHON:

1. Nama dan umur/ Nama Perusahaan :.....
2. Kewarganegaraan dan/ atau Kartu Penduduk (KTP) ataupun surat Bukti Identitas lainnya :.....
3. Pekerjaan/ Jabatan :.....
4. Tempat tinggal/ Kedudukan :.....
5. Akte Pendirian/ Peraturan Badan Hukum :.....
Tgl/Nomor Akte/ Peraturan Pendirian Tgl./ Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Kehakiman :.....

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Statusnya : Hak Milik No...../.....
HGB No...../.....
Bekas Hak Milik Adat.....
2. Surat Ukur/ Gambar Situasi : Tgl.....No.....
3. Luas :.....
4. Letaknya : Jalan.....
Kel/ Desa.....
Kec.....
Kab/Kodya.....
Prop.....
5. Batas-batas : Utara.....
Timur.....
Selatan.....
Barat.....
6. Jenis Tanah (Pertanian/Non Pertanian) :
7. Dasar Penguasaannya :.....
(Pemegang Hak sejak semula, Akta PPAT, Lelang, Pelepasan Hak, Dll).
8. Penguasaannya (sepenuhnya dikuasai pemohon dan atau dipergunakan oleh pihak lain atas persetujuan pemohon) :.....
9. Rencana penggunaannya :.....

C. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI PEMOHON :
(Sebutkan Status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten atau Kotamadyanya saja)

- 1
- Kabupaten/Kotamadya
- 2 dst

D. SURAT- SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Foto copy Bukti Identitas dan atau Akte/Peraturan Pendirian Badan Hukum :
2. Foto copy keputusan pengesahan Badan Hukum :
3. Sertipikat atau Bukti Bekas Hak Milik Adat :
4. Akta Pelepasan Hak / Jual Beli/ Wasiat/Hibah/ Warisan/ Pindahan Hak :
5. Kutipan Risalah Lelang :
6. Surat Persetujuan Dari Pemegang Hak :
7. Putusan Pengadilan :
8. Surat Pernyataan Jumlah Bidang Tanah yang telah dipunyai Pemohon :
9. Surat perolehan lainnya :

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat- syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh pemerintah.

Catatan:

*) Kalau pemohon bertindak atas nama

.....Tgl.....

Pemohon

(.....)

Lampiran 27
Formulir Isian 405 c

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN PERUBAHAN HAK

No.....

(Kep. MNA/Ka. BPN Nomor 16 Tahun 1997)

Telah terima berkas permohonan Perubahan Hak.....menjadi Hak....., atas nama..... yang terletak di Jalan....., Desa/Kelurahan *)....., Kecamatan....., yang terdiri dari:

1. Formulir permohonan Perubahan Hak tanggal.....(yang telah diisi dan ditandatangani pemohon)
2. Fotocopy identitas (Perorangan)
3. Fotocopy Badan Hukum dan pengesahannya atau Peraturan Pendirian Badan Hukum
4. Surat-surat bukti perolehan tanah :
 - a. Sertipikat HM/HGB/HP/Hak Milik Adat Nomor.....Tercatat atas nama.....
 - b. Kutipan Risalah Lelang dari.....tanggal.....nomor.....
5. Surat-Surat Ukur lain :
 - a. Persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan tanggalnomor.....
 - b. Surat Pernyataan dari pemohon tanggal.....mengenai jumlah bidang dan luas yang telah dimiliki.
 - c.
 - d. Dst

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Petugas Yang Menerima

(.....)
NIP.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 28
Formulir Isian 406 b

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Sdr.....
Perihal : Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan
Perubahan Hak di.....

Sehubungan dengan permohonan perubahan Hak.....menjadi Hak.....yang saudara ajukan atas tanah yang terletak di :

Desa/Kel *) :
Kecamatan :

Dengan ini diberitahukan bahwa untuk perubahan hak dimaksud kepada Saudara diwajibkan membayar uang pemasukan kepada Negara dengan perincian sebagai berikut :

- a. Disetor pada Kas Negara sebesar Rp.....(.....)
 - b. Disetor pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya.....sebesar Rp.....(.....)
 - c. Disetor pada Kas Pemerintah Daerah Propinsisebesar Rp.....(.....)
2. Uang tersebut butir 1 harus disetor melalui Bendaharawan Khusus pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya *)selambat-lambatnya tanggal.....
 3. Apabila sampai terlambat batas waktu pembayaran tersebut diatas, maka akan diadakan perhitungan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA *)

.....

(.....)
NIP.

Catatan

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
2. Bpk. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.....
3. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara.....

Lampiran 30
Formulir Isian 495 d

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

**TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN
PEMBATALAN HAK**

No.....

Telah terima berkas permohonan Pembatalan Hak..... atas nama, yang terletak di Jalan.....Desa/Kelurahan *)....., Kecamatan, yang terdiri dari :

1. Formulir permohonan pembatalan Hak..... (yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon)
2. Fotocopy identitas (Perorangan)
3. Foto copy Akta Badan Hukum dan pengesahannya atau Peraturan Pendirian Badan Hukum
4. Surat-surat bukti perolehan tanah :
 - a. Sertipikat Hak.....Nomor.....Tercatat atas nama.....
 - b. Surat Keputusantanggal.....Nomor.....
 - c.dst
5. Surat-surat lainnya :
 - a.
 - b.
 - c.dst

An. Kepala Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.....
Petugas Yang Menerima

(.....)
NIP.....

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 31
Formulir Isian 410 b

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

Nomor : Kepada Yth.
 Perihal : Bpk. Kepala Kantor Wilayah
 Badan Pertanahan Nasional
 Propinsi.....
 di.....

DAFTAR – PENGANTAR

Nomor	Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan dan pertimbangan
1.	Asli permohonan pembatalan hak.....atas nama.....		Terhadap permohonan tersebut pertimbangan kami : 1. Setuju dikabulkan Diusulkan untuk ditolak 2. Syarat-syarat khusus
2.	Foto copy Surat Keputusan		
3.	Foto copy KTP/Surat kewarganegaraan akte pendirian Badan Hukum dan Keputusan pengesahan Badan		
4.	Hukum.		
5.	Foto copy Sertipikat		
6.	Surat-surat lainnya..... Dst.....		
	Jumlah		

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kotamadya

.....
 NIP.....

Tembusan :

1. Bpk Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
2. Sdr.....

Catatan penerimaan :
, tgl.....19.....
 An Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
 Propinsi.....

.....

Lampiran 33
Formulir Isian 410 c

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 PROPINSI.....

Nomor	:		Kepada Yth.
Perihal	:	Bpk.	Menteri Negara Agraria
		Kepala Badan Pertanahan Nasional
		Propinsi.....
			di.....

DAFTAR – PENGANTAR

Nomor	Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan dan pertimbangan
1.	Asli permohonan pembatalan hak.....atas nama.....		Terhadap permohonan tersebut pertimbangan kami : 3. Setuju dikabulkan Diusulkan untuk ditolak 4. Syarat-syarat khusus
2.	Foto copy Surat Keputusan		
3.	Foto copy KTP/Surat kewarganegaraan akte pendirian Badan Hukum dan Keputusan pengesahan Badan Hukum.		
4.	Hukum.		
5.	Foto copy Sertipikat		
6.	Surat-surat lainnya..... Dst.....		
	Jumlah		

Kepala Kantor Wilayah Badan
 Pertanahan Nasional
 Propinsi

.....

.....
 NIP.....

Tembusan :

- 3. Sdr Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya
- 4. Sdr.....

Catatan penerimaan :

....., tgl.....19.....
 An Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

.....

Lampiran 35
Formulir Isian 403 a

SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI
PEMOHON

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal.....Nomor.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemohon :

Nama :
(Perorangan atau Badan Hukum)
Pekerjaan :
(Bila Perorangan)
Alamat/berkedudukan di :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- bahwa saya, Istri/Suami dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan saya, telah mempunyai tanah-tanah (termasuk tanah yang dimohon) sebanyak :(.....) bidang dan luas keseluruhannya adalahM2.....(.....)
- bahwa P.T. (Badan Hukum) yang telah mempunyai tanah-tanah (termasuk) tanah yang dimohon sebanyak(.....) bidang dan luas keseluruhannya adalahM2.....(.....)

yang rinciannya terdiri dari :

No. urut	Status Hak (jelaskan No.Hak/blm bersertipikat)	Luas (M2)	Letak Tanah
1.			
2.	dst.		

Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan ijin mengalihkan hak atas tanah hak.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sanggup dituntut di hadapan Pengadilan bila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tidak benar.

.....tanggal.....
Pemohon

Materai
(.....)
Nama jelas

Lampiran 36
Formulir Isian 402 g

PERMOHONAN IZIN
 PERALIHAN HAK

KEPADA Yth
 Bapak Menteri Negara Agraria/
 Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Di Jakarta
 Up. Bapak Kepala Kantor Wilayah
 Badan Pertanahan Nasional
 Propinsi.....
 Melalui
 Bapak Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kotamadya.....
 di.....

Yang bertandatangan di bawah ini.....alamat.....dalam hal ini bertindak atas nama*), dengan ini mengajukan permohonan izin peralihan hakdengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI DIRI PEMOHON :

- 1 Nama dan Umur :
- 2 Kewarganegaraan dan/atau
Kartu Penduduk (KTP)
Ataupun surat keterangan
Dari Kepala Desa/Camat :
- 3 Pekerja/Jabatan :
- 4 Tempat Tinggal/Kedudukan :
- 5 Susunan keluarga istri :
- 6 Anak yang menjadi tanggungan : 1.....
2.....
3.....
- 7 Akte Pendirian/Peraturan :
Badan Hukum/No.Keputusan
Menteri Dalam Negeri/
Kehakiman

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

- 1 Letaknya : Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
madya
Propinsi :
- 2 Luasnya :M2
Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl.....Nomor.....
- 3 Batas-batas : Utara.....
Timur.....
Selatan.....
Barat.....
- 4 Status Tanah :
- 5 Jenis dan Keadaan tanah :
- 6 Dasar Penguasaan :
- 7 Penggunaannya :

- C. TANAH LAIN YANG : 1.
DIPUNYAI SI PEMOHON Kabupaten/Kodya.....
(Sebutkan status tanah luas, dan 2.
letaknya sesuai dengan menunjuk 3.
Kabupaten/Kotamadyanya saja) 4.

D. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Foto copy Identitas diri (Perorangan)
2. Foto copy akta pendirian dan pengesahannya atau peraturan pendirian badan hukum
3. Foto copy Sertipikat Hak.....
4. Surat-surat lain :
 - a.
 - b.
 - c. dst

Apabila permohonan tersebut dikabulkan. Pemohom bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh pemerintah.

Catatan : Coret yang tidak perlu

.....tgl.....
Pemohon,

(.....)

MODEL BUKU :
REGISTER PERMOHONAN IZIN PERALIHAN HAK

Nomor & Tanggal				a.Nama Pemohon b.Alamat c.Pekerjaan	Letak Tanah a.Desu/Kel b.Kecamatan c.Luas	Sertipikat a.Tgl b.No	Surat Usulan Kakanwil a. Tgl b. No.	SK KBPN a. Tgl b. No. c. Isi lampiran	Ket.
Urut	Agenda								
	Bagian P&K	DEPUTI III	Dit/Subdit						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN IZIN PERALIHAN HAK

No :

Telah terima berkas permohonan Peralihan Hak....., atas nama, yang terletak di jalan, Desa/Kelurahan *), Kecamatan, yang terdiri dari :

1. Formulir permohonan peralihan Hak(yang telah diisi dan ditandatanganinya oleh pemohon)
2. Foto copy identitas (Perorangan)
3. Foto copy Akta Badan Hukum dan pengesahannya atau Peraturan Pendirian Badan Hukum.
4. Surat-surat bukti perolehan tanah :
 - a. Sertipikat Hak.....Nomor.....Tercatat atas nama.....
 - b.
 - c.dst
5. Surat-surat lainnya :
 - a. Surat Pernyataan Pemohon tanggal.....mengenai jumlah bidang dan luas tanah yang telah dimiliki
 - b.
 - ..
 - c.dst

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.....
Petugas yang menerima,

(.....)
NIP.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 39
Formulir Isian 411

UNTUK MENDAPATKAN IJIN MENGALIHKAN HAK

I. Keterangan Mengenai Pemohon

1. Nama Pemohon/Badan Hukum :
2. Bila Pemohon Perorangan :
 - a. Identitas (KTP, SIM, Pasport, dll) :
 - b. Kewarganegaraan :
 - c. Alamat :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Nama Istri/Suami :
 - f. Jumlah anak yang menjadi tanggungan :
3. Bila Pemohon Badan Hukum :
 - a. Tempat Kedudukan Kantor Pusat :
 - b. Akta/Peraturan Pendiriannya :
 - c. Pengesahan Akta Pendirian :
 - d. Tempat Kedudukan Kantor Cabang (bila ada) :

II. Keterangan Mengenai Tanah Yang Akan Dialihkan :

1. Jenis dan Nomor Hak :
2. Luas :
3. Letak Tanah :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Daerah Kabupaten/Kotamadya :
 - e. Daerah Propinsi :
4. Penggunaannya
(jelaskan siapa yang menggunakan tanah tersebut, bila pihak lain uraikan hubungan hukumnya dengan pemohon (Pemegang Hak), dan jelaskan penggunaannya di lapangan sekarang ini (pertanian, perkebunan, perumahan, perkantoran, industri, dll), jelaskan juga rencana peruntukannya menurut RTRW Kabupaten/Kotamadya)

III. Alasan Pemohon Untuk Mengalihkan Hak

1. (jelaskan alasan-alasan pemohon untuk mengalihkan tanah tsb).
2.
3.dst

IV. Lain-lain :

1. Tanah-tanah lainnya yang dimiliki Pemohon :

No urut	JENIS HAK	LETAK (Desa/kel/Kec, Kab/Kodya Prop)	LUAS (M2)	PENGGUNAANNYA

2. Permodalan (Bila digunakan untuk usaha) :
(Jelaskan menggunakan modal asing atau modal nasional, dll)
3. dan seterusnya yang dianggap penting...

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata ada yang tidak sesuai, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku pemohon

Dibuat di :
Tanggal :

Pemohon,

Nama :
Identitas :

No

Permohonan tersebut diatas **DITOLAK/DIIZINKAN** dengan syarat, bahwa jika ternyata keterangan-keterangan dalam angka I, II, III dan IV tersebut diatas tidak benar, maka izin ini menjadi batal dengan sendirinya, dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya tuntutan Pidana terhadap Pemohon

Ditetapkan di :
Tanggal :
Kakan, Kanwil BPN, MNA/Ka. BPN

(.....)

Lampiran 40
Formulir Isian 403 b

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan, Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kotamadya....., Propinsi....., seluas ...M2 yang telah diberikan Hak.....berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi...../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... sampai saat ini secara fisik masih kami kuasai dan hingga saat ini tidak ada sengketa/permasalahan dengan pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Yang membuat pernyataan

(.....)

Lampiran 41
Formulir isian 402 h

PERMOHONAN
 PERPANJANGAN
 PEMBAYARAN UP

- KEPADA Yth.
- X) 1 Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
 Pertanahan Nasional
 2 Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
 Nasional Propinsi.....di.....
 3 Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
 Kotamadya.....di.....

Yang bertanda tangan di bawah ini.....alamat.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....*), dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan pembayaran uang pemasukan atas Keputusan..... tanggal..... Nomor.....dengan keterangan sebagai berikut:

A. MENGENAI DIRI PEMOHON:

Nama dan Umur :.....
 Kewarganegaraan dan/atau
 Kartu tanda Penduduk (KTP) atau
 Pu Surat keterangan dari kepala
 Desa atau camat :.....
 Pekerjaan/Jabatan :.....
 Tempat tinggal/kedudukan :.....
 Susunan keluarga istri :.....
 Anak yang menjadi tanggungan :1.....
 2.....
 3.....

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letaknya : Jalan :.....
 Kelurahan/Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten/kotamadya :.....
 Propinsi :.....

Luasnya :.....M2
 Surat Ukur/ Gambar Situasi
 Tgl.....Nomor.....

Batas-Batas : Utara.....
 Timur.....
 Selatan.....
 Barat.....

2. Tanggal dan Nomor Keputusan :.....
 Pemberian Hak
 3. Alasan Permohonan Perpanjangan Jangka :.....
 Waktu Pembayaran Uang Pemasukan

C. SURAT – SURAT YANG DI LAMPIRKAN

1. Foto Copy Surat Keputusan Pemberian Hak Tanggal.....
 Nomor.....
2. Surat alasan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat – syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh pemerintah.

Catatan:

Coret yang tidak perlu

x) disesuaikan dengan Pejabat yang

Berwenang - Vide PMNA/KBPN No.3

Tahun 1999

*Kalau pemohon bertindak atas

Atas nama

.....Tgl.....

Pemohon

(.....)

Lampiran 43
Formulir Isian 405 f

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN
PERPANJANGAN PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN
No:.....

Telah terima berkas permohonan Perpanjangan Pembayaran Uang Pemasukan atas nama:....., yang terletak di Jalan....., Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., yang terdiri dari :

1. Formulir permohonan perpanjangan pembayaran uang pemasukan tanggal.....(yang telah diisi dan ditanda tangani pemohon).
2. Foto Copy SK pemberian hak tanggal.....Nomor.....
3. Surat alasan permohonan perpanjangan pembayaran uang pemasukan tanggal.....
4. Surat – surat lain :
 - a.
 - ...
 - b.
 -
 - c. Dst

An.Kakan, Ka.Kanwil BPN,
MNA/Ka.BPN
Petugas Yang Menerima,

(.....)
NIP.....

Keterangan
Coret yang tidak perlu

Lampiran 44
Formulir Isian 401 g

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTAMADYA

.....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN DAN PENDAFTARAN
HAK ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....
TANGGAL.....NOMOR.....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....

Membaca : Surat permohonan dari..... berkedudukan
di, tanggalberserta berkas yang berhubungan dengan itu.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
.....tanggal.....Nomor.....Kepada.....telah diberikan
Hak.....atas tanah seluas..... M² (.....) terletak di
Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kotamadya, Provinsi dengan
kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar
Rp.....,-(.....)

b. Bahwa kewajiban membayar uang pemasukan tersebut huruf a di atas
sangat memberatkan pemohon (d disesuaikan dengan alasan), sehingga
penerima hak memerlukan perpanjangan jangka waktu pembayaran
uang pemasukan.

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka
permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan
dimaksud dipandang telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan
kebijakan Pemerintah sehingga dapat dipertimbangkan untuk
dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
5. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1977;
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1998 jo Nomor 6 Tahun 1998;
10. Peraturan Menteri Agraria Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : a. berikan kepadaberkedudukan di, perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada Negara dan pendaftaran Hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum..... huruf dan butir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..... sebesar Rp....., (.....)
- b. Pembayaran uang pemasukan kepada negara dan pendaftaran hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, harus dibayar lunas dan didaftarkan haknya selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....

(.....)

KEPADA :

.....
.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,.....
3. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
4. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi,.....
7. Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II,.....
8. Kepala Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya.....
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
10. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan,

Lampiran 44
Formulir Isian 401 h

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI.....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI.....

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN DAN PENDAFTARAN
HAK ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI.....

TANGGAL.....NOMOR.....

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI.....

Membaca : Surat permohonan dari..... berkedudukan di....., tanggal
berserta berkas yang berhubungan dengan itu.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan
Nasional Propinsi..... tanggal.....Nomor..... Kepada.....
telah diberikan Hak.....atas tanah seluas..... M² (.....) terletak
di Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kotamadya, Provinsi dengan
kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar
Rp.....,-(.....)

b. Bahwa besarnya uang pemasukan tersebut huruf a di atas sangat
memberatkan pemohon (d disesuaikan dengan alasan), sehingga penerima
hak memerlukan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang
pemasukan.

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka
permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan
dimaksud dipandang telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan
kebijakan Pemerintah sehingga dapat dipertimbangkan untuk
dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
5. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1977;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1998 jo Nomor 6 Tahun 1998;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : a. Memberikan kepadaberkedudukan di, perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada Negara dan pendaftaran Hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum..... huruf dan butir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi..... sebesar Rp....., (.....)

b. Pembayaran uang pemasukan kepada negara dan pendaftaran hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, harus dibayar lunas dan didaftarkan haknya selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI.....

.....

KEPADA :

.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,.....
3. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
4. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
6. Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II,.....
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....,.....
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
9. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan,

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR :.....
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN DAN PENDAFTARAN
HAK ATAS KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
TANGGAL.....NOMOR.....

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Membaca : Surat permohonan dari..... berkedudukan di....., tanggal
berserta berkas yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional..... tanggal.....Nomor.....
Kepada..... telah diberikan Hak.....atas tanah seluas..... M²
(.....) terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kotamadya, Provinsi dengan kewajiban
membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp.....,-
(.....)
- b. Bahwa besarnya uang pemasukan tersebut huruf a di atas sangat
memberatkan pemohon (d disesuaikan dengan alasan), sehingga penerima
hak memerlukan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang
pemasukan.
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka
permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan
dimaksud dipandang telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan
kebijakan Pemerintah sehingga dapat dipertimbangkan untuk
dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
5. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1977;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : a. Memberikan kepadaberkedudukan di, perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada Negara dan pendaftaran Hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum..... huruf dan butir Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional..... sebesar Rp....., (.....)

b. Pembayaran uang pemasukan kepada negara dan pendaftaran hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, harus dibayar lunas dan didaftarkan haknya selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL :

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL

.....

KEPADA :
.....
...
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,.....
2. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
3. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
5. Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi.....
7. Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....
NOMOR :.....
TENTANG
PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....
TANGGAL.....NOMOR.....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....

Membaca : Surat permohonan dari berkedudukan
di, tanggalbeserta berkas yang berhubungan dengan itu.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
.....tanggal.....Nomor.....Kepada.....telah diberikan
Hak.....atas tanah seluas..... M² (.....) terletak di
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya
....., Provinsi dengan kewajiban membayar uang
pemasukan kepada Negara sebesar Rp.....-
(.....)

b. Bahwa kewajiban membayar uang pemasukan tersebut huruf a di atas
sangat memberatkan pemohon (d disesuaikan dengan alasan), sehingga
penerima hak memerlukan perpanjangan jangka waktu pembayaran
uang pemasukan.

c. Bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dan
tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah, maka permohonan tersebut
tidak dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
5. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1977;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1998 jo Nomor 6 Tahun 1998;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menolak permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum huruf dan butir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebesar Rp.,- (.....) dari Alamat/berkedudukan di
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....

(.....)

KEPADA :
.....
.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,.....
3. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
4. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi,.....
7. Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II,.....
8. Kepala Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
10. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan,

Lampiran 45
Formulir Isian 401 k

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI.....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI.....

NOMOR :.....

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI.....
TANGGAL.....NOMOR.....

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI.....

Membaca : Surat permohonan dari..... berkedudukan di....., tanggal
berserta berkas yang berhubungan dengan itu.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan
Nasional Propinsi..... tanggal.....Nomor..... Kepada.....
telah diberikan Hak.....atas tanah seluas..... M² (.....) terletak
di Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kaupaten/Kotamadya, Provinsi dengan kewajiban
membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp.....,-
(.....)

b. Bahwa besarnya uang pemasukan tersebut huruf a di atas sangat
memberatkan pemohon (d disesuaikan dengan alasan), sehingga penerima
hak memerlukan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang
pemasukan.

c. Bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dan
tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah, maka permohonan tersebut
tidak dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
5. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1977;
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1998 jo Nomor 6 Tahun 1998;
10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Menolak permohonan perpanjangan jangka panjang pembayaran uang pemasukan kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum huruf dan butir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi sebesar Rp.,- (.....) dari Alamat/berkedudukan di
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :.....
PADA TANGGAL :.....

KEPALA KANTOR WILAYAH
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 PROPINSI.....

.....

KEPADA :

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,.....
3. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
4. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
6. Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II,.....
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....,.....
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
9. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan,

Lampiran 44
Formulir Isian 401 i

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TANGGAL.....NOMOR.....

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Membaca : Surat permohonan dari..... berkedudukan di....., tanggal beserta berkas yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional..... tanggal.....Nomor..... Kepada..... telah diberikan Hak.....atas tanah seluas..... M² (.....) terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Provinsi dengan kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp.....,-(.....)
- b. Bahwa besarnya uang pemasukan tersebut huruf a di atas sangat memberatkan pemohon (d disesuaikan dengan alasan), sehingga penerima hak memerlukan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan.
- c. Bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
5. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998
6. Keputusan Presiden Nomor Tahun
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1977;
8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Menolak permohonan perpanjangan pembayaran jangka waktu uang pemasukan kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum huruf dan butir Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional..... sebesar Rp.....,- (.....)
dari Alamat/berkedudukan di

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL :

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL

.....

KEPADA :

.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,.....
2. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
3. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
5. Direktur Pengadaan Tanah Instansi pemerintah Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.....,.....
7. Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II,.....
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....,.....
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,